

BAB II

AGRESI MILITER BELANDA II

A. Memanasnya Hubungan RI dan Belanda

Sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda dengan berbagai cara ingin kembali menguasai Republik Indonesia (RI). Belanda tidak bersedia mengakui Republik Indonesia dan berusaha menegakkan kekuasaannya kembali. Berbagai jalan ditempuh Belanda untuk memojokkan RI baik dengan diplomasi maupun militer.

Diplomasi pertama yang dilakukan antara RI dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati. Ketua delegasi RI adalah Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda adalah Prof. Schermerhorn. Penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah Belanda yang lama membuat pihak RI ragu bahwa perjanjian tersebut akan dijalankan Pemerintah Belanda. Setelah melalui perdebatan yang lama akhirnya Perjanjian Linggarjati ditandatangani dengan khidmat di istana *Rijswijk* (Sekarang Istana Negara) pada tanggal 25 Maret 1947 dengan pokok-pokok sebagai berikut.¹

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai *de facto* menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

¹ Ide Anak Agung Gde Agung, '*Renville*' – *als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen*, a.b. Hanny Rungkat, dkk, *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 37-38.

2. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama supaya segera terbentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokratis dan federal.
3. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan bekerja sama untuk kepentingan bersama Negeri Belanda dan Indonesia supaya terbentuk suatu Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Raja Belanda.

Sayap kiri yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin (Amir Sjarifuddin dan Sjahrir semula ada dalam satu partai) menolak hasil perjanjian tersebut. Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai Sjahrir malah menjatuhkannya. Presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, dan Setiadjudi untuk membentuk Kabinet Nasional. Setelah Sjahrir turun dari jabatan Perdana Menteri, ia kemudian diangkat sebagai penasihat presiden.²

Pada tanggal 14 dan 15 Juli 1947 diadakanlah pertemuan antara Amir Syarifuddin dan Van Mook. Pertemuan tersebut membicarakan soal penjagaan di pos-pos perbatasan, yang telah ditetapkan untuk dijaga oleh polisi campuran Belanda-Indonesia yang disebut *Gendarmerie*. Pihak Belanda juga mendesak antara lain agar pihak RI segera menghentikan propaganda anti Belanda, pengunduran wilayah yang dikuasai RI sampai 10 Kilometer (Km) dari batas

² Tjokropranolo, *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Surya Persindo, 1992, hlm. 91.

daerah pendudukan Belanda, dan pengunduran tentara harus selesai tanggal 21 Juli 1947.³

Pada tanggal 20 Juli 1947 Wakil Perdana Menteri A.K. Gani menemui Prof. Schermerhorn dengan membawa usul yaitu supaya Delegasi RI dan Komisi Jenderal Belanda untuk mengadakan perundingan. Jika perundingan menemui jalan buntu, maka pihak Belanda dan RI mencari penengah dari negara netral. Jika usaha tersebut gagal maka Mahkamah Internasional diminta untuk menunjuk negara yang akan bertindak sebagai penengah.

Usaha terakhir yang dilakukan RI ternyata sia-sia karena pada tanggal 21 Juli 1947 Perdana Menteri Belanda Dr. Louis Beel telah mengucapkan pidatonya yang isinya memberi kuasa penuh kepada van Mook untuk melakukan aksi Militer. Alasannya pihak RI tidak menepati hasil Perjanjian Linggarjati dan menolak usul Belanda tanggal 27 Mei 1947⁴. Akibatnya pidato PM Beel itu, hubungan telepon antara Jakarta dan Yogyakarta sejak tanggal 20 Juli 1947 telah diblokir oleh pihak Belanda.⁵

Agresi Militer Belanda berlangsung sejak 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Untuk mengelabui dunia luar Belanda menamakan sebagai se buah aksi polisionil

³ *Ibid.*, hlm. 92.

⁴ Pada tanggal 27 Mei 1947 Pemerintah Belanda mengirimkan memorandum kepada RI yang isinya antara lain berupa usul membentuk pemerintahan bersama, mengeluarkan uang bersama, menyelenggarakan impor - ekspor bersama, mengirimkan beras ke daerah di luar Jawa-Madura, dan penyelenggaraan ketertiban serta keamanan dengan bantuan pihak Belanda di seluruh wilayah RI. Dalam *ibid.*, hlm. 93.

⁵ *Ibid.*

untuk mengamankan wilayah Indonesia. Tujuan-tujuan militer Belanda adalah menduduki seluruh Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah diduduki di sekitar kota-kota besar di Jawa, seperti Semarang dan Surabaya serta pendudukan daerah-daerah perkebunan dan minyak di Sumatra, seperti Deli, Palembang, dan sekitarnya.⁶ Hal ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah strategis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Jam 19.00 WIB setelah diketahui Belanda menyerang dan menerobos garis-garis demarkasi, maka Panglima Besar Sudirman menyampaikan amanat radio antara lain sebagai berikut.

Sekarang tiba saatnya bagi segenap lapisan rakyat Indonesia untuk menunaikan sumpahnya terhadap Tuhan dan Ibu Pertiwi, menjalanakan dengan sungguh-sungguhnya semboyan-semboyan cinta kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan dan kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Insyaf dan ingatlah! korban telah banyak, penderitaan tidak sedikit, maka jangan sekali-kali kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia yang telah kita miliki dan kita pertahankan itu, dilepaskan dan kita serahkan kepada siapapun juga. ..⁷

Pemimpin aksi militer Belanda yaitu Van Mook dan Jenderal Spoor beberapa kali mengirim telegram kepada Menteri Urusan Daerah Seberang Lautan Jonkman. Mereka memohon supaya boleh melanjutkan aksi militer sampai ke Yogyakarta dan menduduki ibukota RI dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi, Menteri Jonkman menolak hal tersebut karena pasukan Belanda tidak cukup kuat terhadap aksi yang sedemikian besarnya dan juga mengingat perdebatan-perdebatan di Dewan Keamanan PBB akan merugikan bagi pihak

⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 45.

⁷ Tjokropranolo, *loc.cit.*

Belanda sendiri.⁸ Jika Belanda sampai menduduki Yogyakarta maka posisi Belanda akan dikucilkan oleh dunia Internasional.

Aksi Militer Belanda atau lebih dikenal dengan Agresi Militer Belanda I ini membuat PBB terlibat langsung. Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menyukai “aksi polisionil” tersebut, menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap RI. India, Australia, dan Uni Soviet juga sangat aktif mendukung RI di dalam PBB. Sekutu-sekutu utama Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika Serikat yang paling diandalkan Belanda untuk memberi dukungan ternyata, malah tidak menyukai Agresi Militer tersebut.⁹

Pada akhir bulan Juli 1947, pihak Belanda menyadari bahwa mereka harus menerima imbauan PBB untuk melakukan gencatan senjata (*cease fire*). PBB selanjutnya memperkenankan Sjahrir untuk berbicara atas nama Republik, tetapi tidak bersedia menerima para wakil dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda karena bukan dari kemauan rakyat yang bebas dan netral. Dalam pidatonya Sjahrir mengatakan memuji keputusan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan permusuhan antara RI dan Belanda. Sjahrir juga mengatakan siap menerima arbitrase yang tidak berpihak atau netral.¹⁰

⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, *loc.cit.*

⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2009, hlm. 474.

¹⁰ Tjokropranolo, *op.cit.*, hlm. 96.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 1947 dibentuklah Komite Jasa -Jasa Baik PBB atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN)¹¹. Komisi ini bertujuan untuk membantu perundingan RI dan Belanda dalam mencapai gencatan senjata yang baru. Karena sejak dimulainya Agresi Militer, Belanda telah melanjutkan operasi pembersihan di belakang garis terdepan mereka, dimana banyak kaum pejuang RI tinggal. Khususnya, Divisi Siliwangi tetap berada di belakang garis-garis Belanda di Jawa Barat.¹²

KTN menginginkan perselisihan antara RI dan Belanda diselesaikan dengan jalan damai. Upaya melakukan gencatan senjata harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan segera menempuh jalur perundingan. Masalah yang sulit dipecahkan adalah adanya garis Van Mook. Pihak RI tidak mau begitu saja mengakui “Garis Van Mook”¹³ yang tentu saja semakin memojokkan pihak RI karena wilayahnya semakin sempit. Di dalam Garis Van Mook ini juga masih ada

¹¹ Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN terdiri dari negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pemerintah RI menunjuk Australia sebagai anggota KTN karena Australia yang mengajukan persoalan RI dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Belanda menunjuk Belgia sebagai wakilnya karena kedua negara ini anggota Benelux atau Persekutuan Belgia, Belanda, dan Luxemburg. Kemudian Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat, karena negara ini yang menggagas usul resolusi tanggal 25 Agustus 1947 tentang gencatan senjata antara RI dan Belanda. Setelah itu, negara Australia mengangkat hakim Richard C. Kirby, negara Belgia mengangkat Paul van Zeeland, dan negara Amerika Serikat mengangkat Prof. Frank Porter Graham sebagai wakil masing-masing negara. Dalam Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 56.

¹² M.C. Ricklefs, *loc.cit.*

¹³ Garis Van Mook adalah garis demarkasi yang digagas Van Mook pada tanggal 29 Agustus 1947 dan diumumkan secara sepihak dan menunjukkan wilayah-wilayah mana yang diduduki pasukan-pasukan Belanda pasca Agresi Militer Belanda. Dalam Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 54.

tentara RI yang masih aktif beroperasi melakukan serangan-serangan kepada Belanda.

Setelah KTN tiba di Jakarta, usulan pertama yang diajukan untuk menyepakati adanya gencatan senjata adalah mengadakan tempat perundingan. KTN mengusulkan mengadakan perundingan di sebuah kapal laut yang berlabuh di luar zona tiga mil atau tempat yang netral. Pemerintah Amerika Serikat diminta supaya menyediakan kapal laut. Amerika Serikat kemudian menyediakan sebuah kapal pengangkut pasukan *USS Renville*. Kapal ini tiba dan berlabuh di teluk Jakarta pada tanggal 2 Desember 1947.¹⁴

Salah satu pokok yang menjadi agenda dari perjanjian tersebut adalah menghentikan permusuhan atau gencatan senjata. Negara Belanda selalu berpegang teguh dengan Garis Van Mook sedangkan pihak RI tidak mengakui adanya Garis Van Mook. Akhirnya setelah melakukan pendekatan-pendekatan yang lama dari kedua belah pihak, perjanjian *Renville* dapat ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948. Bagi pihak RI perjanjian *Renville* bisa dikatakan merugikan karena wilayahnya semakin sempit, tetapi bagi pihak Belanda perjanjian tersebut sangat menguntungkan.

Perjanjian *Renville* tidak menghilangkan pertentangan-pertentangan yang telah menimbulkan peperangan kemerdekaan pertama. Malah sebaliknya, menambah beberapa pertentangan yang baru yakni mengenai cara menetapkan nasib dari bagian RI yang dianggap daerah pendudukan Belanda menurut *Renville*. RI bersedia untuk memberikan beberapa konsesi yang berat waktu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

penandatanganan *Renville*, dalam penghargaan bahwa kelanjutan campur tangan yang langsung dari Dewan Keamanan akan membuka jalan untuk mencapai persetujuan yang memuaskan dan campur tangan tersebut dapat menghindarkan pecahnya peperangan lagi.¹⁵

Kekecewaan atas hasil-hasil perjanjian *Renville* yang mengharuskan TNI hijrah telah memicu perpecahan di Jawa Barat. Pada bulan Februari 1948 dalam kongres Islam di Cisayong, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memutuskan untuk memisahkan diri dari kelompok moderat yang menyetujui hijrah. Kartosoewirjo mendapat dukungan dari pejuang Hizbullah kemudian membentuk *Darul Islam* atau Kerajaan Islam di Jawa dengan tentaranya bernama TII (Tentara Islam Indonesia).¹⁶

Keharusan TNI untuk hijrah sebagai konsekuensi dari perjanjian *Renville*, lebih menimbulkan ketidakpuasan bagi kalangan militer. Keterpojokan RI menyebabkan PM Amir Sjarifuddin terpaksa menerima syarat-syarat yang memberatkan tersebut. Akhirnya Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri kemudian Presiden Soekarno menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri.¹⁷

Selama pemerintahan Hatta golongan kiri (komunis) kurang mendapatkan perhatian sehingga memunculkan kekecewaan. Kekecewaan itu diluapkan dalam

¹⁵ T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm. 133.

¹⁶ Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000, hlm.15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

bentuk pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dengan tokohnya Muso. RI tentu saja menjadi bertambah pekerjaannya karena selain harus menghadapi politik Belanda yang licik dan juga harus menumpas pemberontakan PKI Madiun. TNI berhasil menumpas pasukan pemberontak dan menangkap kurang lebih 350.000 tawanan dari kaum pemberontak.¹⁸

Keberhasilan TNI dalam menumpas pemberontakan PKI dengan kekuatan sendiri mendapatkan simpati dari dunia Internasional. Amerika Serikat juga semakin lebih berpihak kepada RI karena keberhasilan menumpas pemberontakan komunis tersebut. Secara politis kedudukan Belanda semakin terdesak karena berangsur-angsur RI mendapat dukungan di PBB. Kemudian Dr. Beel pengganti Van Mook bersama Jenderal Spoor secara diam-diam mempersiapkan armadanya untuk menyerang Yogyakarta sebagai ibukota RI.¹⁹

Pihak tentara RI sebenarnya sudah mengetahui bahwa Agresi Militer Belanda II suatu saat akan terjadi lagi. Akan tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh para pemimpin pemerintahan karena KTN pada saat itu pindah di Kaliurang Ibukota RI. KTN pindah ke Kaliurang dengan menggunakan pesawat terbang dengan anggotanya Critchley wakil dari Australia, Seon sebagai penasehat Cochran wakil dari Amerika Serikat, dan Konsul India Dr. Allagappan.²⁰

Setelah kepindahan KTN di Kaliurang membuat posisi Belanda semakin sulit untuk melakukan Agresi Militer ke Ibukota RI di Yogyakarta. Belanda

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹ Tjokropranolo, *op.cit.*, hlm. 116.

²⁰ *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 8 Desember 1949, Tahun IV No. 59, hlm. 1.

berusaha memperpanas situasi dengan berbagai cara termasuk menghentikan perundingan dan melakukan tuduhan terhadap RI. Belanda menuduh RI melakukan cara-cara yang radikal dalam melaksanakan gencatan senjata dan menuduh RI tidak menerima hasil perjanjian *Renville*. Situasi yang demikian memaksa KTN untuk melaporkannya ke Dewan Keamanan PBB.²¹

Perkiraan akan adanya perang antara RI dan Belanda sudah mulai berkembang. Sejak Belanda memutuskan untuk menghentikan perundingan dengan RI maka pikiran semua orang tertuju pada pikiran akan adanya peperangan. Kalangan politisi di London, Inggris merasa heran dengan pendirian Belanda karena telah memutuskan perundingan dengan RI karena jika Belanda melancarkan Agresi Militer di Yogyakarta maka akan membuat posisinya semakin sulit.²²

Pada tanggal 17 Desember 1948 Dr. Beel menyuruh Elink Schuurman mengawatkan nota kepada Cochran yang harus dijawab Hatta paling lambat hari Sabtu tanggal 18 Desember 1948. Batas waktu menjawab yang singkat membuat seolah-olah nota tersebut seperti ultimatum. Nota dari Belanda tersebut tidak memberi pandangan-pandangan yang baru untuk memulai lagi perundingan-perundingan. Pemerintah Belanda mau mengadakan perundingan dengan RI dengan syarat sebagai berikut.²³

²¹ *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 13 Desember 1949, Tahun IV No. 63, hlm. 1.

²² *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 15 Desember 1948, Tahun IV No. 65, hlm. 1

²³ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 191.

1. Menerima tanpa syarat pokok-pokok yang terutama dari Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan, yang dalam waktu yang singkat akan diumumkan.
2. Turut-sertanya Republik Indonesia dalam Pemerintahan Interim Federal atas dasar Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan sama seperti negara-negara bagian dan daerah-daerah bagian lainnya.
3. Menerima apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan, yang ada hubungannya dengan wewenang Wakil Tinggi Kerajaan, angkatan perang, pimpinan tertinggi angkatan perang, pengumuman keadaan dalam bahaya perang dan keadaan yang tidak aman.

Nota Belanda tersebut membuat KTN sangat marah, ditambah lagi adanya tekanan yang ditujukan kepada RI tentang batas waktu jawaban nota yang kurang dari dua puluh empat jam tersebut. Cochran atas nama semua anggota KTN meminta dengan tandas pada Pemerintah Belanda untuk memulai lagi perundingan-perundingan. Pada hari Jum'at malam tanggal 17 Desember Kabinet Belanda bersidang untuk menunggu jawaban dari pihak RI akan tetapi jawaban yang ditunggu tidak kunjung datang.

Setelah tidak menerima jawaban dari pihak RI maka Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk memulai aksi militer tersebut. Beland segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konsolidasi aksi tersebut. Untuk mencegah agar aksi tersebut tidak bocor maka persetujuan gencatan senjata

dibatalkan pada tanggal 18 Desember 1948 sekitar pukul 23.30.²⁴ Hal tersebut semakin menambah KTN tidak begitu senang dengan Pemerintahan Belanda. Sekitar tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 semua hubungan telegram dengan Jakarta diputuskan oleh Belanda berarti hubungan antara Yogyakarta dengan Jakarta telah terputus.

Pemutusan hubungan telegram tersebut membuat Cochran yang pada saat itu ada di Jakarta tidak dapat di berhubungan dengan anggota KTN di Kaliurang. Karena tidak mungkin memberikan kabar ke Yogyakarta akhirnya Cochran mengirimkan telegram ke Dewan Keamanan PBB tentang dimulainya peperangan antara pihak RI dan Belanda, kemudian mengakhiri laporan tersebut dengan kata-kata sebagai berikut.²⁵

Komisi Jasa-jasa Baik menyerukan dengan sangat kepada Dewan Keamanan supaya peperangan (permusuhan) di Indonesia yang berarti pelanggaran persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948 di atas (kapal) *Renville* – ditinjau (diteliti) dengan sangat mendesak.

B. Jalannya Agresi Militer Belanda II

Pada awal kehidupan RI banyak didirikan laskar rakyat yang dimaksudkan untuk membantu TNI dalam menanggulangi serangan musuh. Yogyakarta termasuk daerah yang banyak didirikan laskar-laskar rakyat yang merupakan gabungan dari semua unsur. Panglimanya adalah Sultan Hamengku Buwono IX

²⁴ *Ibid.*, hlm. 192.

²⁵ Telegram Delegasi Belanda di Jakarta kepada Menteri Urusan Wilayah Seberang Lautan. Delegasi 324, ref. No.10751, 19 Desember 1948. Arsip Kementerian Dalam Negeri. Bundel telegram No.11. Dalam *Ibid.*, hlm. 193-194.

sendiri dan kepala stafnya adalah Selo Soemardjan. Untuk kesiap-siagaan laskar tersebut Jenderal Soedirman pada tanggal 15 Desember 1948 mengumumkan berencana mengadakan latihan umum perang-perangan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 1949.²⁶

Pihak Belanda sendiri masih berambisi untuk menghancurkan RI beserta TNI dengan operasi militer merupakan impian yang harus segera dilakukan. Syarat utama yang diperlukan bagi berhasilnya operasi itu adalah kecepatan bergerak dan sebanyak mungkin menawan pegawai-pegawai RI agar tulang punggung perlawanan RI dapat dipatahkan. Tujuan itu hanya dapat dicapai dengan penerjunan pasukan di Maguwo atau pendaratan melalui laut.

Kedua cara operasi tersebut mengandung resiko tersendiri. Pimpinan tentara Belanda memperkirakan bahwa AURI memiliki beberapa pesawat yang siap pakai di Maguwo. Pesawat tersebut dengan mudah akan mampu menghantam gerakan pasukan Belanda yang ada di Pacitan. Penerjunan pasukan dari udara juga merupakan hal yang beresiko karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Belanda. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya pimpinan Belanda mengambil keputusan bahwa cara bertindak dengan penerjunan dari udara lebih memungkinkan daripada pendaratan dari laut.²⁷

Bersamaan dengan penerjunan pasukan di Maguwo yang selanjutnya menduduki Yogyakarta, operasi di Jawa Tengah juga akan dilakukan lewat jalur

²⁶ Mohamad Roem, dkk, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan HB IX*. Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 69.

²⁷ Seskoed. *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1993, hlm. 85.

darat. Pergerakan pasukan Belanda lewat jalur darat adalah untuk menghancurkan sasaran pokok pusat kekuatan TNI di sekitar Jawa Tengah. Rencana pembagian operasi militer lewat jalur darat adalah sebagai berikut.²⁸

1. Kolone I di bawah pimpinan Kolonel Van Langen bertugas menduduki Maguwo dengan pasukan payung (*Paratroops*). Setelah lapangan terbang ini dikuasai akan didaratkan pasukan tempur “M”²⁹ yang bertugas menduduki Yogyakarta. Pasukan lain dari Kolone I ini bergerak ke Surakarta melalui poros Boyolali dan Kartasura.
2. Kolone II di bawah pimpinan Kolonel De Vries bertugas membersihkan dan menguasai jalan raya Salatiga – Solo dan menguasai kota Solo.
3. Kolone III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Schilperoord bergerak ke Cepu melalui Kudus, Rembang, dan Blora untuk menguasai kota-kota tersebut.
4. Kolone IV di bawah pimpinan Kolonel Van Zanten, bertugas pokok bergerak dari Gombong melalui Kebumen ke Purworejo kemudian melalui Salaman ke Magelang. Kolone ini bekerja sama dengan Kolone I yang bergerak dari Yogya melalui 2 poros ke Magelang.
5. Kolone V di bawah pimpinan Letnan Kolonel Bastiaanse dengan tugas melalui poros Banjarnegara – Wonosobo untuk menguasai kota ini.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

²⁹ Pasukan Tempur “M” terdiri dari Batalyon I Resimen Infanteri 15, Resimen S-5 Para I, dan Kompi Para KST (*Korps Speciale Troepen*). Dalam *ibid.*, hlm. 87.

Gerakan maju pasukan induk juga dibantu oleh pasukan -pasukan kecil yang merupakan pecahan dari kolone-kolone bersangkutan. Gerakan pembantu Kolone III ialah dari Demak melalui Purwodadi ke Gundih, sedang Kolone V dari Paninggaran melalui pegunungan ke Karangobar sebelah Barat Banjarnegara. Pasukan yang diterjunkan adalah Pasukan Tempur “M”. Pasukan untuk menyerang di dekat garis demarkasi sebanyak 4 Kompi pelindung Batalyon 5, masing-masing dari Sukorejo ke Parakan, dari Blora ke Temanggung, dari Sumowono ke Temanggung, dan Bedono ke Secang. Selain itu masih ada Batalyon 411 dan 2 kompi Batalyon 402 yang menjaga garis belakang.

Pasukan tersebut ditunjang oleh angkatan udara dengan mengumpulkan semua pesawat tempur dan pesawat angkut. Pesawat-pesawat yang akan dipakai adalah sebagai berikut.³⁰

1. Pesawat dari Skadron ke-20 berjumlah 15 buah.
2. Pesawat terbang dari Angkatan Udara Belanda dan KLM (*Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*) berjumlah 8 buah.
3. Pesawat terbang jenis *Mustang P-51* dari Panglima Angkatan Udara berjumlah 6 buah.
4. Skadron 121, Skadron 120, Skadron 322, dan Skadron 6 yang masing - masing memiliki 6 buah *Mustang P-51*, 10 buah *Kittyhawk*, 8 buah *Spitfires*, dan 2 buah *Auster* (Pesawat Pengintai).
5. Pesawat Pembom dari Skadron 18 berjumlah 5 buah.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

Persiapan untuk merebut lapangan terbang Maguwo dilakukan di lapangan terbang Andir pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 02.00. Inspeksi pasukan dilakukan oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Engels pukul 04.00 dan pada pukul 04.30 pesawat pertama meninggalkan landasan. Pesawat-pesawat terbang Belanda terbang diatas Kota Yogyakarta sekitar pukul 05.15. Pada mulanya tak ada yang mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat Belanda. Hal tersebut bisa terjadi karena sesuai dengan instruksi pimpinan Jenderal Sudirman bahwa pada tanggal 19 Desember 1949 akan diadakan latihan perang TNI. Ketika hari masih gelap sekitar pukul 05.45 terdengar letusan bom yang pertama dari sebelah timur kota Yogyakarta tepatnya di Wonocatur dan Maguwo.³¹

Kota Yogyakarta bagian timur terdengar banyak sekali suara tembakan dan banyak pasukan payung diterjunkan di sekitar Maguwo. Rakyat RI yang ada di Kota Yogyakarta panik karena tidak mengetahui bahwa tentara Belanda mulai melakukan aksi militernya. Pengungsi yang berasal dari Jawa Barat, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dll kebingungan mencari tempat perlindungan. Mereka kemudian memutuskan untuk menuju ke luar Kota Yogyakarta mencari tempat perlindungan.³² Kebanyakan para pengungsi ini menuju ke arah selatan

³¹ *Gerilya Wehrkreise III*. Yogyakarta: Percetakan Keluarga, tt, hlm. 9.

³² *Ibid.*, hlm. 10.

yaitu ke daerah Bantul.³³ Sebagian besar pengungsi adalah dari luar Yogyakarta seperti dari Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.³⁴

Belanda memperhitungkan keadaan TNI dalam kondisi lemah karena baru saja bertempur menghadapi pemberontakan PKI di Ma diun. Kekuatan maupun dislokasi TNI tidak lagi tersebar di daerah strategis dan belum siap untuk bertempur melawan Belanda. Penyebaran pasukan TNI di perbatasan Yogyakarta guna menanggulangi serangan Belanda lewat jalur darat. Strategi yang dipakai waktu itu adalah pertahanan linier yaitu menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan.

Batalyon Sardjono diperbantukan di Kebumen dan Gombang untuk mengantisipasi pergerakan Belanda dari arah Barat Daya. Bagian Barat lainnya juga dijaga ketat oleh pasukan TNI seperti di Kretek Bantar daerah Kulon Progo. Kemudian di Sleman tepatnya di Tempel pasukan TNI dijaga ketat oleh Batalyon Sudjono untuk mengantisipasi gerakan Belanda dari arah Utara. Daerah Timur tepatnya Prambanan juga dijaga ketat untuk mengantisipasi serangan Belanda dari arah Timur Laut.³⁵

Yogyakarta otomatis tidak dijaga ketat oleh TNI hanya 2 peleton dari Brigade 10/III. Pasukan tersebut mulai pukul 07.15 telah diperintahkan untuk mengadakan gerakan penghambatan atas gerakan Belanda dari Maguwo menuju

³³ Wawancara dengan Ibu Juwariyah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 di Pakelrejo Umbulharjo Yogyakarta.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mardjono pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 di dusun Bibis Sewon Bantul.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Wagiran pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011.

ke kota. Kira-kira pukul 09.00 pasukan tersebut dapat ditambah lagi dengan kekuatan 2 Peleton dari Militer Akademi (MA). Tugas pasukan tersebut hanya melakukan penghambatan guna memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi pasukan yang berada di Kota dan bagi pemimpin RI.³⁶

Gerakan Belanda dari Maguwo menuju ke kota dimulai dari pagi dan dapat berhasil ke Kota Yogyakarta pada pukul 14.45. Pasukan Belanda kemudian menduduki tempat-tempat yang penting dan strategis guna mengisolir kota Yogyakarta dari pasukan-pasukan TNI. Sementara di dalam kota Yogyakarta sejak terdengar berita bahwa Belanda melakukan Agresi Militer II Presiden Soekarno segera memanggil menteri-menterinya untuk segera mengadakan sidang kabinet.

Bung Hatta sebagai Perdana Menteri waktu itu masih berada di Kaliurang setelah mengadakan perundingan dengan pihak Belanda dan KTN. Sri Sultan HB IX yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara segera menuju Istana Negara dan menemui Presiden. Bung Karno meminta Sri Sultan HB IX untuk menjemput wakil presiden masih berada di Kaliurang.³⁷ Di bagian gedung, Sri Sultan HB IX bertemu dengan Sutan Sjahrir yang menyatakan ingin ikut ke Kaliurang.

Sri Sultan HB IX dan Sutan Sjahrir berangkat mengendarai mobil menuju ke Kaliurang. Perjalanan ke Kaliurang ini penuh resiko besar karena pada waktu itu pesawat terbang Belanda masih berada di atas Kota Yogyakarta. Di tengah-

³⁶ *Gerilya Wehrkreise III, op.cit.*, hlm. 10.

³⁷ A.Eryono, *Reuni Keluarga Bekas Resimen 22-WK.III. Pada Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta*. Jawa Tengah: Keris-22-WK.III, 1982, hlm. 86.

tengah perjalanan, Sri Sultan HB IX dan Sutan Sjahrir bertemu dengan Bung Hatta yang hendak pulang ke Kota Yogyakarta. Sri Sultan HB IX segera memberitahukan kepada Bung Hatta bahwa keadaan sedang gawat dan sudah ditunggu oleh Presiden di Istana Presiden.

Pada saat Sri Sultan HB IX memutar kembali mobil untuk kembali ke kota, pesawat terbang Belanda “bercocol merah” menjatuhkan granat, sehingga terpaksa mengambil jalan di tengah-tengah pedesaan.³⁸ Setelah Bung Hatta dan Sri Sultan HB IX sampai di Istana Negara sidang darurat segera dimulai. Sidang kabinet tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut.³⁹

1. Pemerintah RI (Presiden dan para menteri) tidak akan meninggalkan Yogyakarta dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta untuk mempermudah mengadakan perhubungan dengan pihak KTN.
2. Bila Presiden dengan anggota kabinetnya di Yogyakarta sampai tertangkap Belanda, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra disertai tugas untuk membentuk dan memimpin Kabinet Darurat atau kalau perlu suatu Pemerintahan RI di Luar Negeri dengan mandat kepada Mr. Maramis (Menteri Keuangan) yang sedang berada di India.
3. Kepada seluruh rakyat RI, Presiden memberi amanat sebagai berikut.

³⁸ Mohamad Roem, dkk, *op.cit.*, hlm. 71.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 87-88.

Bahwa RI yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus kita pertahankan mati-matian. Bila kemerdekaan kita telah meresap pada jiwa seluruh rakyat RI mustahil bila dapat ditindas dengan kekerasan. Demikianlah amanat presiden.

Setelah sidang darurat selesai hasil keputusan tersebut segera diumumkan termasuk mengirimkan telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Maramis. Telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara berbunyi:

“Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatra.”

Telegram kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. Maramis di New Delhi berbunyi:

“Kami Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, bahwa tentara Belanda melakukan penyerangan terhadap Ibu Kota Yogyakarta pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Jika usaha Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatra tidak berhasil, kami memberikan kepada Anda kekuasaan untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan yang akan merupakan Pemerintahan dalam pengasingan yang akan merupakan Pemerintahan Republik Indonesia di India. Mohon mengadakan hubungan dengan Sjafruddin Prawiranegara mengenai masalah ini di Sumatra. Seandainya ini tidak berhasil, mohon mengambil segala langkah yang mungkin.”⁴⁰

Sjafruddin berhasil mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatra pada tanggal 19 Desember 1948. Susunannya adalah sebagai berikut.⁴¹

⁴⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 195-196.

⁴¹ *Ibid.*

1. Ketua (Perdana Menteri), merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
2. Menteri Luar Negeri : Mr. A. A. Maramis.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merangkap Menteri Dalam Negeri *ad interim* dan Menteri Agama *ad interim* : Mr. Teuku Moh. Hassan.
4. Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman : M. Lukman Hakim.
5. Menteri Sosial dan Perburuhan, Pembangunan, Organisasi Pemuda dan Keamanan : Mr. Sutan Rasyid.
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan *ad interim*: Ir. Sitompul.
7. Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran *ad interim*: Ir. Inderacaya.

Jenderal Sudirman yang masih sakit karena setelah menjalani operasi juga datang ke Istana Presiden. Jenderal sudirman juga menulis Perintah Kilat yang nanti akan disiarkan setelah bertemu dengan presiden. Setelah tiba di Istana Presiden, sidang kabinet yang sudah dimulai sempat dihentikan karena melihat kedatangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kemudian mengeluarkan Perintah Kilatnya setelah mengetahui sikap yang diambil pemerintah. Isi dari Perintah Kilat yang akan disiarkan lewat Radio Republik Indonesia (RRI) adalah sebagai berikut.⁴²

⁴² A.Eryono, *op.cit.*, hlm. 89.

Perintah Kilat

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda, menyerang kota Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Perintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Dikeluarkan di tempat
Tanggal : 19 Desember 1948
Jam : 03.00

Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia

Ttd

Letnan Jenderal Sudirman

Sri Sultan HB IX menasehati Jenderal Sudirman untuk tidak kembali ke rumah akan tetapi menuju Gedung Mangkubumen di dalam sekitar Keraton. Jenderal Sudirman kemudian menuju rumah kediaman di Bintaran Tengah untuk membakar dokumen-dokumen penting. Dokter Pribadi Jenderal Sudirman yaitu dr. Suwondo menyarankan agar segera meninggalkan rumah untuk menuju ke Gedung Mangkubumen. Sri Sultan HB IX sudah menyiapkan Gedung Mangkubumen untuk beristirahat Jenderal Sudirman.

Kolonel Latif Hendraningrat sebagai Komando Komando Militer Kota (KMK) melaporkan kepada Jenderal Sudirman bahwa Belanda sudah memasuki Kota Yogyakarta pada pukul 14.00.⁴³ Jenderal Sudirman kemudian memutuskan untuk melakukan gerilya agar tidak tertangkap oleh Belanda. Jenderal Sudirman beserta rombongan pengawalnya bergerak ke arah selatan (Bantul) kemudian

⁴³ *Ibid.*, hlm. 90.

menuju ke daerah Gunung Kidul. Sementara itu, Belanda memasuki kota dan menuju ke Istana Presiden. Para pemimpin pemerintahan RI tertawa Belanda di Istana Presiden.

Belanda telah menduduki Kota Yogyakarta, setelah itu kira-kira pukul 17.00 Kolonel Van Langen, Komandan *Tijgerbrigade* Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer untuk daerah Yogyakarta mendatangi Keraton. Kedatangan mereka disertai oleh pejabat Belanda bernama Westerhof, kemudian mereka memperlihatkan peta Kota Yogyakarta yang telah diberikan garis merah. Belanda rupanya ingin menjadikan Sri Sultan HB IX sebagai tahanan rumah, begitu juga dengan Paku Alam sebagai wakil dari Sri Sultan HB IX.⁴⁴

Beberapa hari setelah Belanda menduduki Yogyakarta, Para pemimpin RI mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim ke Brastagi, sementara Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Assaat ke Bangka. Para pemimpin RI yang tidak tertangkap meloloskan diri ke luar kota ada pula yang menyamar di dalam kota untuk ikut bergerak di bawah tanah.⁴⁵

Sementara itu ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, banyak anggota Dewan Keamanan telah berangkat ke luar Paris untuk berlibur Natal bersama keluarganya. Sehubungan dengan itu pemimpin delegasi tetap Amerika Serikat di PBB Jessup, mendapatkan tugas untuk mengajukan soal Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 Desember 1949 dia meminta secara tertulis

⁴⁴ Mohamad Roem, dkk, *op.cit.*, hlm. 72.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 72-73.

Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang kilat guna membahas situasi gawat tersebut.

Pada tanggal 22 Desember 1949 Dewan Keamanan PBB baru dapat menggelar sidang pembahasan masalah RI – Belanda. Delegasi Belanda dibawah pimpinan Dr. J.H. van Roijen Duta Besar Belanda di Ottawa . Roijen dipandang sebagai salah seorang diplomat Belanda yang paling cerdas. Palar bertindak sebagai utusan RI karena telah mengikuti semua pembicaraan mengenai RI di Dewan Keamanan PBB. Belanda mendapat celaan dari para anggota Dewan Keamanan PBB kecuali Belgia dan Perancis.⁴⁶

Putaran pertama sidang di Dewan Keamanan PBB terjadi pada tanggal 22 hingga 28 Desember 1949. Van Roijen mendapat kesempatan untuk menerangkan bahwa Agresi Militer atas nama Pemerintah Belanda. Van Roijen menguraikan bahwa politik Belanda mengenai RI ditujukan untuk memulihkan tata tertib dan ketentraman. Setelah aksi militer tersebut secepat mungkin akan diwujudkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka sebagai sekutu yang sederajat dalam Uni Indonesia-Belanda.

Palar kemudian berpidato bahwa dia telah menuduh Pemerintah Belanda dengan mengatakan aksi militer itu merupakan bagian suatu politik yang bertujuan untuk membinasakan RI. Pada mulanya Belanda mengadakan *embargo* ekonomi untuk melemahkan RI kemudian secara diam-diam tanpa diketahui KTN

⁴⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 208.

melakukan perundingan dengan negara-negara bagian⁴⁷ untuk membentuk Pemerintahan Federal Sementara tanpa mengikutsertakan RI. Palar melihat sepak terjang Belanda ini merupakan ancaman perdamaian di Asia Tenggara dan dunia.

Palar menyerukan agar Dewan Keamanan segera menghentikan permusuhan secepat mungkin dan Belanda segera kembali ke tempat-tempat kedudukannya semula di dekat garis demarkasi. Kemudian Palar meminta para Pemimpin Pemerintahan yang ditawan segera dibebaskan agar dapat melakukan tugas-tugas mereka. Palar menilai bahwa pembatalan gencatan senjata dan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda adalah tidak benar.⁴⁸

C. Pembagian Tugas di *Wehrkreise* III

Agresi Militer Belanda II membuat rakyat Yogyakarta menjadi panik dan kebingungan. Sementara itu TNI sedang berada di perbatasan Yogyakarta untuk mengantisipasi serbuan Belanda lewat jalur darat. Belanda yang melakukan penyerbuan Yogyakarta lewat jalur udara sangat mudah untuk menguasai Kota Yogyakarta. Setelah Jenderal Sudirman meninggalkan Kota Yogyakarta dan para pemimpin pemerintah tertawan, Kota Yogyakarta menjadi bertambah genting.

Belanda menerima imbauan PBB agar mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatera, akan

⁴⁷ Negara-negara Bagian merupakan sebuah politik Belanda untuk memecah belah wilayah dari Indonesia. Dengan adanya Negara-negara Bagian maka wilayah Republik Indonesia akan semakin sempit dan Republik Indonesia akan masuk di dalam negara bagian tersebut. Negara bagian ini merupakan wujud dari pembentukan Uni Indonesia-Belanda.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

tetapi perang gerilya masih terus berlangsung. Jenderal Sudirman kini berada dalam keadaan yang kritis karena penyakit paru-parunya. A.H. Nasution sebagai wakil panglima secara efektif menggantikan tugas Jenderal Soedirman kemudian pada tanggal 22 Desember 1948, dia memproklamasikan suatu pemerintahan militer untuk Jawa. Proklamasi itu diwujudkan dalam Instruksi No. 1/MBKD/48 yang isinya pembentukan dan cara-cara pelaksanaan Pemerintah Militer dengan susunan sebagai berikut.⁴⁹

1. Panglima Besar Angkatan Perang (PBAP) “MBT”
2. Markas Besar Komando Djawa (MBKD)
3. Gubernur Militer (GM)
4. Komando Militer Daerah (KDM) dan Sub Teritorial Comando (STC)
5. Komando Distrik Militer (KDM)
6. Komando Onder Distrik Militer (KODM)
7. Kader Desa, Kader Dukuh
8. Instalasi Sipil (Residen, Bupati, Camat, dan Lurah)

Pemerintahan Militer ini dilengkapi dengan staf-staf yang mengurus tentang tugas-tugas eksekutif di daerah yang direncanakan sebagai cadangan daerah gerilya, yang meliputi :⁵⁰

1. Pemerintahan umum; masalah organisasi, kehakiman, ketertiban dan perhubungan.

⁴⁹ Tjokropranolo, *op.cit.*, hlm. 105-106.

⁵⁰ *Ibid.*

2. Masalah perekonomian; adalah menyelenggarakan kelancaran perekonomian di dalam pemerintah dan kantong-kantong gerilya.
3. Masalah kemasyarakatan; mengatur usaha-usaha kesejahteraan masyarakat misalnya, pendidikan dan pengorganisasian.
4. Masalah pertahanan; dalam arti pertahanan desa.

Pemerintah RI dan TNI telah bersiap-siap terlebih dahulu sebelum Belanda melakukan Agresi Militer II. Instruksi No. 1/MBKD/48 dan Perintah Kilat Jenderal Sudirman merupakan landasan dan konsep umum operasi untuk dijabarkan dalam berbagai rencana operasi. Di samping itu, kedua perintah itu juga menjadi landasan sistem perlawanan baru yaitu perlawanan gerilya total. Instruksi No. 1/MBKD/48 mengganti sistem pertahanan linier menjadi pertahanan rakyat total dengan membentuk kantong-kantong gerilya yang disebut *Wehrkreise* (WK).⁵¹

Sistem *Wehrkreise* disiapkan untuk menghadapi kemungkinan pasukan Belanda memasuki wilayah RI dan terpecah-pecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang menduduki sejumlah besar kota beserta objek-objek vital. *Wehrkreise* merupakan sebuah wilayah perlawanan dengan sistem pertahanan dan perlawanan yang mendasar kepada sistem pertahanan totalitas. Di dalam *Wehrkreise* dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan satuan tempur (Batalyon-batalyon Infanteri), Komando Teritorial (KDM, KODM), *sub-wehrkreise* (SWK), Pasukan Mobil dan Satuan-satuan Bantuan Tempur serta Bantuan Administrasi.

⁵¹ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 174.

Wilayah Yogyakarta masuk ke dalam *Wehrkreise* III yang dikomandani oleh Letkol Soeharto. Pada tanggal 31 Desember 1948, Letkol Soeharto berhasil mengkoordinasi dan membagi wilayah gerilya Yogyakarta menjadi 6 bagian dan kemudian pada bulan Januari 1949 bagian-bagian itu disempurnakan menjadi daerah *Sub-Wehrkreise* (disingkat SWK). Keenam bagian itu adalah sebagai berikut.⁵²

1. SWK 101 meliputi daerah bagian dalam kota dengan Komandan Letnan Marsudi.
2. SWK 102 meliputi daerah bagian selatan termasuk tenggara dengan Komandan Mayor Sardjono.
3. SWK 103 meliputi daerah bagian barat, sektor barat A dipimpin oleh Letkol Suhud, dan sektor barat B dipimpin oleh Mayor Soemoeal.
4. SWK 104 meliputi daerah bagian utara dengan Komandan Mayor Soekasno.
5. SWK 105 meliputi daerah bagian timur dengan Komandan Mayor Soedjono.
6. SWK 106 meliputi daerah bagian barat khusus (Kulon Progo) dengan Komandan Letkol Soeharto.

Pusat komando *Wehrkreise* III adalah di Segoroyoso Pleret dan Komandan Brigade 10 Divisi III, Letkol Soeharto berhasil mengkoordinasi pertahanan sekaligus penyerangan terhadap kedudukan musuh. Dapat dikatakan, daerah

⁵² Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2010, hlm. 73-74.

antara Segoroyoso sampai Imogiri merupakan pusat gerilya di bagian selatan kota Yogyakarta.⁵³ Dislokasi pasukan juga ditujukan untuk pemerataan jumlah pasukan TNI sehingga terjadi keseimbangan jumlah pasukan.

Penyebaran pasukan TNI membuat Belanda kewalahan untuk menghancurkan TNI dan perlawanan gerilya terjadi secara merata di semua wilayah Yogyakarta. Untuk menyempurnakan pemerataan TNI, pembagian WK III kembali diubah menjadi 7 SWK. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran pasukan maupun personel. Dislokasi pasukan TNI adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. SWK 101 meliputi daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh Lettu Marsoedi bermarkas komandonya di *Prabeyo* (Dapur Keraton). SWK 101 dibagi ke dalam 6 sektor dan tiap sektor ditambah dengan pasukan dan bantuan rakyat. Wilayah SWK 101 adalah di dalam Kota Yogyakarta dengan batas-batas tertentu untuk menjaga keamanan dari setiap sektor, marekanya selalu berpindah-pindah. Susunannya adalah sebagai berikut.
 - a. Daerah Sektor I meliputi dalam Benteng (*Jeron* Benteng) dari sebelah Keraton sampai daerah Kauman dengan komandan Letnan Woeston Zoeber.
 - b. Daerah Sektor II meliputi dalam Benteng (*Jeron* Benteng) dari sebelah timur Keraton sampai daerah Gondomanan dan Kintelan dengan komandan Soedarso Pringgobroto.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 180-187.

- c. Daerah Sektor III meliputi jalan Ngabean ke utara sampai jalan kereta api Tugu ke timur sampai jalan Malioboro dengan komandan Moehtar.
 - d. Sektor IV meliputi wilayah Pakualaman ke utara sampai Kotabaru ke timur sampai jalan Solo, batas selatan sampai jalan Wonosari dengan komandan Rakido.
 - e. Sektor V meliputi daerah sebelah timur Jalan Tugu dan sebelah utara jalan kereta api dengan komandan Soeprijo.
 - f. Sektor VI meliputi daerah sebelah barat Jalan Tugu dan ke selatan sampai Gowongan komandannya Soemardi.
2. SWK 102 meliputi daerah Bantul dipimpin oleh Mayor Sardjono dan bemarkas komando di Pandak, Bantul. Kekuatan SWK 102 terdiri dari 1 batalyon TNI diperkuat dengan kompi senjata bantuan. SWK 102 terdiri dari beberapa kompi dengan pembagian sebagai berikut.
- a. Kompi 1 dipimpin oleh Kapten Widodo berada di Krapyak Dongkelan Bantul.
 - b. Kompi 2 dipimpin oleh Kapten Soedarmo berada di Bakulan.
 - c. Kompi 3 dipimpin oleh Kapten Ali Affandi berada di Kotagede.
 - d. Kompi 4 dipimpin oleh Kapten Soemarmo semula berada di Dusun Tamanan kemudian pindah ke Dusun Semail, lalu pindah ke Bibis Bangunjiwo di sebelah barat Padokan.

3. SWK 103 meliputi daerah Gamping yang dipimpin oleh Letkol Soehoed.

SWK 103 ini bermarkas komando di Gamping. Kekuatan SWK 103 adalah sebagai berikut.

- a. 1 Kompi dipimpin oleh Latif.
- b. 1 Kompi dipimpin oleh Matoelessy.
- c. 1 Regu Corps Polisi Militer (CPM) dipimpin oleh Letnan Adisoero.

4. SWK 103A meliputi daerah Godean yang dipimpin oleh Mayor H.N.

Soemoeal. Markas Komando SWK 103A berada di desa Jering (Godean) dengan kekuatan sebagai berikut.

- a. Yon 151 dipimpin oleh P.C. Harjo Soedirdjo berada di Godean.
- b. 2 Kompi dari Batalyon Andi Matalatta.
- c. 2 Kompi dari Batalyon Pelloepessy.

SWK 103A juga dibagi menjadi beberapa sektor yaitu :

- a. Sektor 1 dipimpin oleh Kapten Frits Rondonoewoe.
- b. Sektor 2 dipimpin oleh Letda Wim Sigar.
- c. Sektor 3 dipimpin oleh Mayor Pelloepessy.
- d. Sektor 4 dipimpin oleh Widarto.
- e. Sektor 5 dipimpin oleh Goenarso.

5. SWK 104 meliputi daerah Sleman yang dipimpin oleh Mayor Soekasno.

Markas SWK 104 berada di Kringinan, Kalasan dengan kekuatan sebagai berikut.

- a. Pasukan A yaitu Kompi Kadet MA (Militer Akademi) terdiri atas 4 Peleton berkedudukan di sekitar Pejambon.

- b. Pasukan B yaitu Batalyon CPM Mayor Sakri Soenarto terdiri dari 5 Peleton berkedudukan di sekitar Pondok Suruh Pakem.
 - c. Pasukan C yaitu Kompi Tentara Pelajar (TP) Martono terdiri dari 3 Peleton berkedudukan di desa Ngepas, Rejondani.
- 6. SWK 105 meliputi daerah Gunung Kidul dipimpin oleh Mayor Soedjono. Markas SWK 105 berada di Srimartani, Sleman. Kekuatan SWK 105 adalah sebagai berikut.
 - a. Kompi 1 dipimpin oleh Kapten Marjono bermarkas di Kalasan.
 - b. Kompi 2 dipimpin oleh Lettu Thomas Rahardjo bermarkas di Sorogenuk.
- 7. SWK 106 meliputi daerah Kulon Progo dipimpin oleh Letkol Soedarto. SWK 106 bermarkas di desa Watumurah, Kenteng, Kulon Progo. Kekuatan SWK 106 adalah sebagai berikut.
 - a. 1 seksi Staf Pengawal dari Brigade 17 dipimpin oleh Lettu Oetoro. Seksi ini terdiri dari 2 regu senjata ringan dan 1 regu senjata berat.
 - b. 1 Kompi dipimpin oleh Noer Moenir yang terdiri dari pasukan Hisbullah dengan kekuatan 1 senjata untuk 3 prajurit.

Pembagian pasukan TNI sudah dirasa cukup untuk menghadapi Belanda. Koordinasi antar pasukan TNI dapat terjalin dengan baik jika pembagian prajurit sudah tertata dengan rapi. Persenjataan yang digunakan berasal dari buatan sendiri dan hasil rampasan. Persenjataan TNI memang masih terbatas karena kebanyakan 1 senjata untuk 3 tentara. Kekurangan senjata tersebut membuat TNI harus

menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, keris, *arit*, *bendo*, dan peralatan tani lainya⁵⁵.

Persenjataan yang dibuat oleh TNI antara lain adalah Pistol Lantak, Pistol Mauser, Pistol Mitraliur (PM), PM Lanchester MK 1, PM -RI, Senapan Mesin Ringan (SMR), Granat Gombyok, Ranjau Darat/Trekbom. Kemudian jenis senjata yang didapat dari hasil rampasan dari tentara Jepang dan Belanda (NICA) antara lain Senapan Lee Enfield (LE) MK III (Belanda), Karaben Arisaka (Jepang), Bernasent (Belanda), Simonov (Rusia), Thesmij (Belanda), Springfield (Amerika Serikat). Amunisi juga didapat melalui merampas atau merawak peninggalan Jepang, kemudian alat komunikasi menggunakan pesawat radio jarak jauh milik jawatan perhubungan Angkatan Udara (AU).⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mardjono pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 di dusun Bibis Sewon Bantul.

⁵⁶ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 189-190.